



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2021



**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang terhingga, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau tahun 2021 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang setiap tahunnya instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsinya selama satu tahun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Semoga Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2021 yang telah tersusun ini sesuai dengan yang diharapkan dan dapat memberi manfaat bagi Pemerintah Provinsi Kabupaten Malinau dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam capaian kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berorientasi pada hasil.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,

H. Saparudin, S.Sos., M.Si
NIP.19640125 198601 1 003





RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LkjiP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LkjiP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan 2016-2021 yang ditunjukkan dengan analisis pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara yang telah ditetapkan pada Tahun 2020 telah berhasil dicapai.

Rumusan sasaran, program dan kegiatan Tahun 2021 yang tertuang dalam dokumen Renstra, IKU, Renja, RKT, PK dan DPA, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara adalah berikut :





Sasaran Dinas Ketahanan Pangan adalah : **Meningkatnya pangan masyarakat sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman serta memperkuat sistem distribusi dan cadangan pangan daerah dengan indikator sasaran , Jumlah Nilai Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan.**

A. Sasaran Pertama adalah **Meningkatkan pendektasian dini kerawanan pangan melalui penyusunan analisis penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaandengan indiktor kinerja, Pengembangan pembuatan PSVA (peta wilayah rawan pangan) dan meningkatkan pelatihan keterampilan penanganan pasca panen olahan hasil pertanian, maka dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan yaitu sebagai berikut:**

- **Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)**
 - a. Data Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
 - b. Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH)

B. Sasaran Kedua adalah : **Pengembangan Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar dengan indikator kinerja, Penyusunan dan Analisa Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi serta Pengembangan penganeakaraman kosumsi pangan yang sehat dan aman maka dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan yaitu sebagai berikut:**

- **Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)**
 - a. Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
 - b. Pemanfaatan Pekarangan
 - c. Penyusunan Pola Pangan Harapan Konsumsi





C. Sasaran ketiga adalah : **Menjaga stabilitas harga pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen dengan indikator kinerja, Pengembangan Cadangan Pangan dan Sistem Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan**, maka dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan yaitu sebagai berikut:

- **Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)**
 - a. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok
 - b. Pemantauan Cadangan Pangan
 - c. Pemantauan Pasokan Distribusi Pangan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan serta kebijakan dalam rangka mencapai target kinerja yang diperjanjikan tahun 2021, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau memperoleh input sebagai berikut:

1. Anggaran sebesar **Rp.5.569.231.557,00**
2. Sumber daya aparatur sejumlah 34 orang PNS. Dari jumlah tersebut terdiri dari pejabat struktural. Dilihat dari jumlah PNS berdasarkan tingkat pendidikan S2 8 (delapan) orang, S1 14 (empat belas) orang, D3 4 (empat) orang dan SLTA 8 (delapan) orang.

Dengan keterbatasan Sumber daya yang ada, prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis dalam penyelenggaraan pemerintahan tetap dikedepankan, dari analisis laporan keuangan dan kegiatan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau pada tahun 2021 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melalui program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meskipun dalam pelaksanaannya kurang maksimal.

Dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan serta koordinasi dan kerjasama tim, permasalahan-permasalahan tersebut tetap dapat diatasi meskipun masih terdapat kekurangan-kekurangan yang tentunya sangat membutuhkan penyempurnaan sebagai langkah perbaikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kedepan, terutama yang berkaitan dengan sarana dan prasana pendukung serta peningkatan jumlah personil baik terkait kualitas maupun kuantitas.





Tantangan keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas SDM pelaksana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau yang baik dan tepat sasaran, dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan SDM baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, SDM pertanian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kualitas maupun kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan pertanian dan kesadaran bertani di Kabupaten Malinau, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kabupaten Malinau.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.





DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	2
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Aspek Strategis Organisasi	2
D. Struktur Organisasi.....	3
E. Sumber Daya Manusia	4
F. Permasalahan Utama yang dihadapi Organisasi	6
G. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	11
A. Rencana Strategis	11
1. Tujuan dan Sasaran	12
2. Indikator Kinerja	14
3. Strategi dan Arah Kebijakan	15
4. Program	17
B. Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja	25
C. Perjanjian Kinerja.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	28
B. Analisis Capaian Kinerja	28
C. Realisasi Anggaran	29
BAB IV PENUTUP.....	34





BAB I PENDAHULUAN

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Agar “*good governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara, dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.



A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Dasar pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau adalah Peraturan Daerah No.4 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Malinau di Bidang Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Peran strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau diwujudkan dalam kebijakan pembangunan perkebunan 6 (enam) tahun kedepan (2016 - 2021) yang diarahkan kepada upaya-upaya sebagai berikut :



- Peningkatan produksi dan produktivitas melalui pengembangan tanaman, peremajaan, rehabilitasi, diversifikasi dengan memperhatikan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, meningkatkan pelayanan dan menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong investasi.
- Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain SDM aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan, SDM petani dan tenaga kerja perkebunan dalam rangka penerapan teknologi, menumbuh kembangkan dukungan masyarakat terhadap pembangunan perkebunan dengan memperhatikan aspek kelembagaan untuk mendorong kemandirian usaha petani.

Beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai kekuatan didalam penyelenggaraan tugas pembangunan adalah sebagai berikut :

- Penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan adanya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999;
- Kondisi iklim, jenis tanah serta tersedianya potensi sumberdaya lahan yang relatif cukup luas;
- Kebijakan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan Kabupaten Malinau diprioritaskan melalui Gerakan Desa Membangun
- Faktor keamanan dan politis yang semakin kondusif.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas



Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Umum

Unsur Pelaksana adalah bidang terdiri dari :

1. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Terdiri dari :
 - a. Seksi Ketersediaan Pangan
 - b. Seksi Sumber Daya Pangan
 - c. Seksi Kerawanan Pangan
2. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Terdiri dari :
 - a. Seksi Distribusi Pangan
 - b. Seksi Harga Pangan
 - c. Seksi Cadangan Pangan
3. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Terdiri dari :
 - a. Seksi Konsumsi Pangan
 - b. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
 - c. Seksi Keamanan Pangan
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Terdiri dari :
 - a. Analis Ketahanan Pangan;
 - b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - c. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
 - d. Jabatan fungsional lainnya.

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau per Januari 2020 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 34 orang yang terdiri dari 16 orang pejabat struktural dan 18 pegawai non struktural.



SDM Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau
menurut tingkat Eselonering

No	Eselonering	Jumlah		Total
		Laki	Perempuan	
1	Eselon I	0	0	0
2	Eselon II b	1	0	1
3	Eselon III a	1	0	1
4	Eselon III b	1	2	3
5	Eselon IV a	6	5	11
6	Non Eselon / Staf	11	9	19
Jumlah		20	15	35

Secara rinci komposisi SDM Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau menurut tingkat pendidikan dapat dilihat sebagai berikut :

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau										
SDM Menurut Tingkat Pendidikan										
Per 31 Desember 2021										
No.	Uraian	Pendidikan								JML
		S3	S2	S1/ DIV	D III	D I	SLTA	SLTP	SD	
1	Struktural									
	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	Kepala Bidang	-	2	1	-	-	-	-	-	3
	Kepala Seksi	-	3	6	-	-	-	-	-	9
	Kepala Sub Bagian	-	1	1	-	-	-	-	-	2
	Sub Jumlah	-	7	9	-	-	-	-	-	16
2	Pegawai Non Struktural/Staf	-	-	6	5	-	8	-	-	18
	Sub Jumlah	-	-	6	5	-	8	-	-	18
3	Honorar PTT	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Honorar Proyek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sub Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		-	7	15	5	-	8	-	-	35

Tabel Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Per 31 Desember 2021



F. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI ORGANISASI

Tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau diBidang Ketahanan Pangan yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tertuang dalam misi 5 yaitu:

Meningkatkan peran Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) dalam Perekonomian Daerah melalui Pengembangan Produk Unggulan Desa, dengan Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui pembangunan Desa Mandiri pangan dan Pembangunan lumbung Desa, Peningkatan Kesejahteraan Petani, Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ;

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi V: Meningkatkan peran serta Pertanian (Tanaman Pangan,Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) dalam perekonomian Daerah melalui Pengembangan Produk Unggulan Desa.				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi Ke V "Meningkatkan peran serta Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) dalam Perekonomian Daerah Melalui Pengembangan Produk Unggulan Desa			
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Pembangunan Desa Mandiri Pangan dan Pembangunan Lumbung Desa.	Peningkatan Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan maksimal	Masih terbatasnya keterampilan petani dalam menggunakan ternologi budidaya tanaman pangan	Memberikan Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan sesuai anjuran
	Program Peningkatan kesejahteraan Petani	Masih rendahnya pendapatan petani	Hasil produksi pertanian tanaman pangan masih rendah	Memberikan bantuan sarana dan prasaran produksi pertanian
	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Pertanian	Belum optimalnya pengolahan pasca panen produk pertanian	Pola Kosumsi pangan masyarakat belum beragam	Tersedianya keanekaragaman pangan lokal



Untuk permasalahan peningkatan hasil produksi pertanian belum maksimal, faktor penghambatnya adalah masih rendahnya kemampuan/keterampilan petani dalam menggunakan teknologi budidaya tanaman pangan. Agar hasil produksi pertanian tanaman pangan meningkat diperlukan penggunaan teknologi pertanian tepat guna sesuai dengan anjuran dengan memberikan pelatihan kepada petani.

Untuk permasalahan masih rendahnya pendapatan petani hal ini disebabkan karena disebabkan karena produksi pertanian yang dihasilkan masih rendah. Masih rendahnya produksi hasil pertanian tanaman pangan disebabkan oleh sarana dan prasarana produksi pertanian masih terbatas. Untuk meningkatkan produksi hasil pertanian diperlukan sarana dan prasarana produksi pertanian.

Belum optimalnya pengolahan pasca panen produk pertanian hal ini disebabkan karena pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Malinau belum beragam, artinya konsumsi utama makanan pokok masih berupa nasi belum ke produk pertanian lain. Sedangkan peluang produk pertanian di Kabupaten Malinau beraneka ragam.

Belum optimalnya pelayanan Dinas Ketahanan Pangan kepada Masyarakat disebabkan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan baru dikukuhkan pada tanggal 12 Januari 2017, dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menempati posisi pada masing- masing bidang tugas masih terbatas dan sarana prasarana operasional yang di miliki Dinas Ketahanan Pangan juga masih terbatas. Agar pelayanan kepada masyarakat bisa dilayani dengan semaksimal mungkin, aparaturnya Dinas Ketahanan pangan menggunakan sarana dan prasarana yang ada.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut. :



No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan alih fungsi lahan pertanian didaerah	Peningkatan Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan maksimal	Masih terbatasnya keterampilan petani dalam menggunakan ternologi budidaya tanaman pangan	Memberikan Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan sesuai anjuran
2	Keterbatasan Infrastruktur Pertanian	Masih rendahnya pendapatan petani	Hasil produksi pertanian tanaman pangan masih rendah	Memberikan bantuan sarana dan prasaran produksi pertanian
3	Belum Optimalnya kawasan strategis Propinsi	Belum optimalnya pengolahan pasca panen produk pertanian	Pola Kosumsi pangan masyarakat belum beragam	Tersedianya keanekaragaman pangan lokal
4	Tofografi kawasan pertanian perbukitan dan bergunung - gunung serta kawasan pedalaman dan pedesaan/	Belum optimalnya tingkat pelayanan kepada masyarakat	Masih terbatasnya sarana dan prasarana apartur	Pemanfaatan sarana dan prasarana seoptimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

Dari hasil identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW yang terdiri dari :

1. Peningkatan alih fungsi lahan pertanian didaerah
2. Keterbatasan Infrastruktur Pertanian
3. Belum Optimalnya kawasan strategis Propinsi
4. Tofografi kawasan pertanian perbukitan dan bergunung – gunung serta kawasan pedalaman dan pedesaan

Implikasi RTRW tentang kawasan pertanian hampir keseluruhan wilayah Kabupaten malinau memiliki topografi berbukit , bergunung – gunung, kawasan pedalaman dan pedesaan sehingga secara tidak langsung menyulitkan pelayanan Dinas kabupaten Malinau jika tidak didukung dengan sarana dan prasarana operasional.

Demikian pula selanjutnya dilakukan hal yang sama pada hasil telaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) diperoleh hasil sebagai berikut :



No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor Penghambat	
			Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian	Peningkatan Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan maksimal	Masih terbatasnya keterampilan petani dalam menggunakan ternologi budidaya tanaman pangan	Memberikan Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan sesuai anjuran
2	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pertanian	Masih rendahnya pendapatan petani	Hasil produksi pertanian tanaman pangan masih rendah	Memberikan bantuan sarana dan prasaran produksi pertanian
3	Belum terpadunya kegiatan antara kawasan perkotaan dan perdesaan	Belum optimalnya pengolahan pasca panen produk pertanian	Pola Kosumsi pangan masyarakat belum beragam	Tersedianya keanekaragaman pangan lokal
4	Peningkatan Saranan dan Prasaranan operasional pendukung pelayanan kepada masyarakat	Belum optimalnya tingkat pelayanan kepada masyarakat	Masih terbatasnya sarana dan prasarana apartur	Pemanfaatan sarana dan prasarana seoptimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

Dari hasil review terhadap faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan SKPD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/ kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Dengan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan yaitu :

- Peningkatan Sumberdaya Apartur Dinas Ketahanan Pangan.
- Terbatasnya sarana dan prasarana operasional Dinas Ketahanan Pangan .
- Masih terbatasnya Aparatur Dinas Ketahanan Pangan sehingga pelayanan kepada masyarakat kurang maksimal.



G. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi peta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan cara pencapaian melalui perencanaan taktik dan teknik agar tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran hingga pendanaan indikatif dengan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam satu tahun melalui Perjanjian Kinerja sesuai RKT 2019 yang tertuang dalam RENSTRA Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan capaian kinerja organisasi dan jumlah anggaran serta realisasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan Kinerja OPD dan capainnya berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB IV PENUTUP

Mengungkapkan uraian singkatKesimpulan umum atas capaian kinerja organisasiserta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan keinerja



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021

Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (UU No. 25 Th. 2004 Pasal 1 Ayat (16), PP No. 8 Th. 2008 Pasal 1 Ayat (13)).

Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumber daya tersebut (Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8)). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD.

Rencana program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan permasalahan yang dihadapi. Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan yang direncanakan untuk Periode Tahun 2016-2021 meliputi program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau dalam rangka pencapaian visi dan misi.



1. Tujuan dan Sasaran

Perencanaan pembangunan daerah secara global merupakan pondasi awal perencanaan setiap satuan perangkat kerja di lingkungan pemerintah daerah dalam menyusun tahapan demi tahapan kinerja pada struktur dan teknis bidang masing-masing sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, dalam merencanakan setiap tahapan pembangunan jangka menengah bidang ketahanan pangan dengan memperhatikan setiap rincian domain perencanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat dan target pada periode yang bersangkutan.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau, dalam rangka peningkatan setiap lini sektor pertanian dalam arti luas perlu dirumuskan visi dan misi sebagai pondasi awal kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Visi kelembagaan akan menjelelaskan arah tujuan atau potret ideal Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau sebagai instansi/lembaga kredibel di masa mendatang sebagai dukungan sebuah system birokrasi maupun pelayanan publik terhadap setiap keberhasilan pembangunan daerah.

Dalam mencapai keberhasilan pembangunan pertanian bidang ketahanan pangan di Kabupaten Malinau maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah sebagai bahan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut tertuang didalam tabel berikut:



Tabel 4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan Ketahanan Pangan Mandiri	Prosentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Daerah	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan :	Kalori / Tahun	Kalori / Tahun	Kalori / Tahun	Kalori / Tahun	Kalori / Tahun	Kalori / Tahun
				1. Padi-padian	20,50	20.91	21.33	21.75	22.19	22.63
				2. Umbi-umbian	2,20	2.24	2.29	2.33	2.38	2.43
				3. Pangan Hewani	13,30	13.57	13.84	14.11	14.40	14.68
				4. Minyak dan Lemak	3,00	3.06	3.12	3.18	3.25	3.31
				5. Buah / Biji Berminyak	0,60	0.61	0.62	0.64	0.65	0.66
				6. Kacang-kacangan	9,70	9.89	10.09	10.29	10.50	10.71
				7. Gula	2,20	2.24	2.29	2.33	2.38	2.43
				8. Sayuran dan Buah	19,00	19.38	19.77	20.16	20.57	20.98
				JUMLAH	70,50	71,91	73,35	74,82	76,31	77,84

Sumber : Target IKU Dinas Ketahanan Pangan 2016-2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,

H. Sabarudin, S.Sos., M.Si
 NIP. 19640125 198601 1 003



2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya.

Pada halaman ini dikemukakan Indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016 - 2021 merupakan serangkaian rencana program yang strategik untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau menetapkan visi dan misi, dan menetapkan tujuan, serta sasaran sehingga akhirnya terbentuk rencana strategik yang meliputi kebijakan, dan program. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 ini akan terus disempurnakan dalam upaya terus meningkatkan daya guna dan hasil gunanya.

TABEL 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengaju Tujuan dan Sasaran RPJMD

3.

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Skor Nasional
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
((1))	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan	Kalori /Tahun	Kalori /Tahun	Kalori /Tahun	Kalori /Tahun	Kalori /Tahun	Kalori /Tahun	Kalori /Tahun	
	1 Padi-padian	20.50	20.91	21.33	21.75	22.19	22.63	25.00	
	2 Umbi-umbian	2.20	2.24	2.29	2.33	2.38	2.43	2.50	
	3 Pangan Hewani	13.30	13.57	13.84	14.11	14.40	14.68	24.00	
	4 Minyak dan Lemak	3.00	3.06	3.12	3.18	3.25	3.31	5.00	
	5 Buah / Biji Berminyak	0.60	0.61	0.62	0.64	0.65	0.66	1.00	
	6 Kacang-kacangan	9.70	9.89	10.09	10.29	10.50	10.71	10.00	
	7 Gula	2.20	2.24	2.29	2.33	2.38	2.43	2.50	
	8 Sayuran dan Buah	19.00	19.38	19.77	20.16	20.57	20.98	30.00	
	9 Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah	70.50	71.91	73.35	74.82	76.31	77.84	100.00	

Sumber : Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016-2021

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Sebagai dinas teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi pada urusan pertanian dan pangan maka Dinas Ketahanan Pangan menjabarkan tujuan dan sasaran dengan cukup terarah pada kerangka pembangunan Kabupaten Malinau namun tetap mengerucut pada pola bidang pangan. Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategi (Renstra) diperlukan strategi dan kebijakan yang secara teknis disesuaikan pada arah pembangunan daerah sehingga tetap berjalan sesuai koridor perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Penyusunan strategi dan kebijakan pada Renstra akan melibatkan keseluruhan elemen kelembagaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi sehingga mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dalam arti luas.



Strategi yang akan dikembangkan melalui optimalisasi dan pengembangan lahan, peningkatan sarana dan prasarana, meningkatkan produkberdaya saing, mengembangkan sistem distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara berkala, peningkatan ketersediaan dan pemantauan cadangan pangan masyarakat serta penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, meningkatnya pengelolaan sumber daya pertanian, peningkatan system tata kelola yang transparan berbasis teknologi informasi melalui peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan kualitas petani dan pelaku usaha.

Sedangkan kebijakan Mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah, Meningkatkan Ketersediaan Pangan Utama, Menurunkan Jumlah Penduduk Rawan Pangan, Meningkatkan Diversifikasi pangandan Gizi, Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok, Peningkatan kinerjainstansi pemerintah, Peningkatan pembinaan dan pelatihan petani dan pelaku usaha.

Tabel 5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

VISI	“ Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun ”		
MISI ke V	Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: “one village one product” dengan semboyan “Bertani Sehat”		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan Ketahanan Pangan Mandiri	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatkan pendektesian dini kerawanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pembuatan PSVA (peta wilayah rawan pangan) • Meningkatkan pelatihan keterampilan penanganan pasca panen olahan hasil pertanian • Penyusunan analisis penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) • Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
		Pengembangan Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar	Penyusunan dan Analisa Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi serta Pengembangan penganeakaraman kosumsi pangan yang sehat dan aman
		Menjaga stabilitas harga pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen	Pengembangan Cadangan Pangan dan Sistem Informasi Harga, Pasokan dan Akses Pangan

Sumber : RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 dan IKU Dinas Ketahanan Pangan 2016-2021

4. Program

Secara garis besar program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau adalah 4 program dan 24 kegiatan, sebagaimana tersebut dibawah ini:



**Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021**

- I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
 1. Penyediaan jasa paralatan kantor
 2. Penyediaan alat tulis kantor (ATK)
 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 4. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (Dalam dan Luar Daerah)
- II. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur**
 5. Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
- III. Program Peningkatan disiplin aparatur**
 6. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- IV. Program Peningkatan Ketahanan Pertranian/Perkebunan**
 7. Penanganan daerah rawan pangan
 8. Penyusunan data base potensi produk pangan
 9. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
 10. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah
 11. Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan
 12. Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan
 13. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
 14. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat
 15. Pemantauan dan analisis harga pangan pokok
 16. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
 17. Pengembangan cadangan pangan daerah
 18. Pengembangan desa mandiri pangan
 19. Pengembangan diversifikasi pangan
 20. Pengembangan lumbung pangan desa
 21. Pengembangan model distribusi pangan efisien
 22. Pengembangan sistem informasi pasar
 23. Peningkatan mutu dan keamanan pangan
 24. Penyuluhan sumber pangan alternative



Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau

Penjelasan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau yang telah dipaparkan diatas akan lebih jelas dipaparkan kembali melalui Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 Terlampir adalah sebagai berikut :

TABEL 6

Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2016	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja pada			
							2017		2018		2019		2020		2021		Akhir Priode RPJMD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Meningkatkan pengelolaan sumberdaya aparatur dan memperkuat kelembagaan petani secara optimal dan berkesinambungan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Kapasitas Sumberdaya aparatur secara optimal dan profesional	Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	359.69	244.50	239.27	248.13	215.67	1.307.25	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Malinau						
					Penyediaan alat tulis kantor	-	90%	52.00	90%	50.50	90%	51.27	90%	53.17	90%	53.77	100%	260.71	Sub Bgian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Malinau
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	-	90%	14.00	90%	14.00	90%	14.52	90%	11.35	100%	14.00	Sub Bgian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Malinau	
					Penyediaan	-	90%	133.55	-	-	-	-	-	-	-	100	5	133.55	Sub	Kabu



				peralatan dan perlengkapan kantor	prosentase penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor dalam satu tahun													Bgian Umum dan Kepegawaian	paten Malinau				
			1	1	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	Jumlah Prosentase Pelaksanaan Konsultasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketahanan Pangan	-	90%	174.14	90%	180.00	90%	174.00	90%	180.44	90%	150.55	100 5	859.13	Sub Bgian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Malinau	
			1	2		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur		-						25.92	-	26.88	-	52.79	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Malinau		
			1	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Kendaraan dinas /Operasional yang terpelihara	-		-				1 Unit	-	1 Unit	25.93	1 Unit	26.89	1 Unit	52.82	Sub Bgian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Malinau



			1	3		Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah kapasitas aparat yang melaksanakan disiplin aparatur												29.04		30.11		59.15	Dinas Ketahanan Pangan	Kabupaten Malinau								
			1	3	5	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	Jumlah pakaian daerah/olahraga aparatur							30 Org		34 Org			29.04	34 Org	30.11	34 Org	59.15	Sub Bgian Umum dan Kepegawaian	Kabupaten Malinau								
Mewujudkan Ketahanan Pangan Mandiri	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatkan pendektasian dini kerawanan pangan.	1	16		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Penurunan Angka Rawan Pangan												640.19		490		341	500	752.76	2.723.95							
			1	16	1	<i>Data Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)</i>	Jumlah Dokumen Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);												209.90		-		40.00	2 Ds	40.00	2 Ds	53.77	10Ds	343.67	Bidang Keterseidaan dan Kerawanan Pangan	Kabupaten Malinau		
			1	16	4	<i>Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH)</i>	Jumlah Dokumen Pembuatan Analisis Neraca Bahan Makanan												-	-	1 Dok	50.00	1 Dok	40.00	1 Dok	50.00	1 Dok	53.77	5 Dok	55.76	Bidang Keterseidaan dan Kerawanan Pangan	Kabupaten Malinau	
			1	16	12	<i>Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian</i>	Jumlah Orang / Kelompok Masyarakat Produktif yang terlatih dalam Pengelolaan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian													50 Org	128.52	100 Org	100.00	100 Org	-	100 Org	100.00	100 Org	107.54	500 Org	436.06	Bidang Keterseidaan dan Kerawanan Pangan	Kabupaten Malinau



Pengembangan Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar	1	16	2	Penyusunan data base potensi produk pangan	Jumlah Skor Persentase Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan	-	80%	94.69	80%	50.00	%	-	%	-	%	-	100%	144.69	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kabupaten Malinau
	1	16	3	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Jumlah Skor PPH Analisis rasio jumlah penduduk terhadap jumlah kebutuhan pangan	-	-	-	-	-	1 Dok	70.00	1 Dok	60.00	1 Dok	107.54	1 Dok	237.54	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kabupaten Malinau
	1	16	9	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkarangan	Jumlah Desa /KWT Optimalisasi dan Pemberdayaan Pemanfaatan Perkarangan Rumah	-	-	2 KWT	150.00	2 KWT	50.00	1 Pkt	100.00	1 Pkt	182.81	5 thn	482.81	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kabupaten Malinau	
	1	16	22	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Jumlah Petugas Penanganan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	-	50 Org	143.60	8 Org	140.00	Dok	40.00	Dok	40.00	Dok	64.52	Dok	428.12	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kabupaten Malinau
	1	16	30	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Jumlah Persentase Pembinaan/Sosialisasi tentang konsumsi pangan yang sehat beragam, bergizi dan seimbang	-	-	-	-	-	20.00	-	20.00	-	-	5 Thn	40.00	Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Kabupaten Malinau	



Menjaga stabilitas harga pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen	1	16	6	Pemantauan Pasokan Distribusi Pangan	Jumlah Persentase Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	-	-	-	80%	25.00	85%	25.99	1 Dok	53.77	90%	104.76	Bidang Distribusi dan cadangan Pangan	Kabupaten Malinau	
	1	16	11	Pemantauan harga pangan pokok	Jumlah Persentase Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	-	80%	63.48	-	85%	30.00	90%	30.00	95%	53.77	100%	177.25	Bidang Distribusi dan cadangan Pangan	Kabupaten Malinau
	1	16	13	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah Persentase Kajian Responsif dan Antisipatif Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	-	-	-	-	85%	26.00	90%	25.00	95%	75.28	100%	126.28	Bidang Distribusi dan cadangan Pangan	Kabupaten Malinau
									999.88	734.50	580.27	803.09	1.025.42						

Sumber : RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 dan IKU Dinas Ketahanan Pangan 2016-2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,

 H. Saparudin, S. Sbs., M.Si
 NIP.19640125 198601 1 003



B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Pada dasarnya Rencana Kinerja (*Performance Plan*) menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau selama tahun 2021. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus di dapat selama tahun 2021 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategik akan dijadikan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya.

Target kinerja untuk tingkat kegiatan juga didefinisikan dalam rencana kinerja untuk tujuan pengukuran efisiensi dan evektifitas kegiatan.

Ikhtisar target kinerja 2021 Dinas Ketahanan Pangan dengan sasaran strategik yang hendak di capai dengan pelaksanaan 4 Program yang dijabarkan ke dalam jumlah nilai Skor PPH Ketersediaan sebesar 77,84 % adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	77,84 %

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas dan Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau berdasarkan APBD tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

No.	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	77,84 %



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	IV. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 20.000.000,-	APBD
2	<u>PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</u>		
	I. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
	1) Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Rp. 55.000.000,-	APBD
	2) Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp. 147.760.000,-	APBD
	3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Rp. 85.000.000,-	APBD
	4) Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Rp. 85.000.000,-	APBD
	II. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		
	1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Rp. 50.000.000,-	APBD
	2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rp. 30.000.000,-	APBD
	III. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
	1) Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Rp. 70.000.000,-	APBD
	2) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rp. 390.000.000,-	APBD



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
3	<p><u>PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</u></p> <p>I. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</p> <p>1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota</p>	Rp. 80.000.000,-	APBD
4	<p><u>PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN :</u></p> <p>I. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</p>	Rp. 50.000.000,-	APBD
Jumlah		Rp. 5.883.145.812,-	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana rencana tingkat capaian yang semakin membaik. Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja serta hasil evaluasi Tim Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau.

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau pada tahun 2021 dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat di lihat dari sasaran yang ditetapkan secara umum semuanya telah dapat di capai dengan baik.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	77,84	81,50	104,70 %

Capaian ini menunjukkan bahwa Skor PPH Ketersediaan dari Target 77,84 dengan Hasil Evaluasi sebesar 81,50 terdapat kelebihan peningkatan 104,70 % , hal ini dikarenakan terdapat bahan Padi-padian dari Target 22,63 yaitu tercapai maksimal 36,00 Kalori/Hari/Tahun (Tabel 3.4 sesuai Skor Nasional). Ini terjadi dikarenakan meningkatnya produktivitas padi lokal untuk kebutuhan petani sendiri berupa beras konsumsi dan tidak di perjualbelikan (masyarakat umum perkotaan sebagian besar mengkonsumsi beras dari luar).

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Perolehan capaian indikator sasaran terhadap sasaran selama tahun 2021 melalui 2 metode yaitu dengan *Sistem Aplikasi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Neraca Bahan Makanan (NBM) Ketersediaan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia serta penggunaan Rumusan IKK yaitu Ketersediaan Pangan Utamaper tahun yang diambil dari Neraca NBM yaitu Jumlah Nilai Produksi dan Impor Beras dibandingkan dengan Jumlah Penduduk.*

$$\text{Ketersediaan Pangan Utama} = \frac{\text{Pangan Utama (Ton)}}{\text{Jumlah Penduduk (Orang)}} \times 1000 = \text{Kg/Orang/Tahun}$$



(1). Aplikasi Neraca Bahan Makanan (NBM) Ketersediaan Kementerian Pertanian RI

Berikut adalah Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan rumus penghitungan capaian kinerjadengan Sistem Aplikasi Neraca Bahan Makanan (NBM) Ketersediaan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesiadengan hasil penghitungan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Hasil Pengukuran Aplikasi Neraca Bahan Makanan (NBM) Ketersediaan Kabupaten Malinau Tahun 2021(Angka Tetap 2020)

No	Komoditas	Produksi (Ton)	Impor (Ton)	Total (Ton)
1	Beras	11.295	1.227	12.522
2	Jagung Kering	97	230	327
3	Kedelai	-	716	716
4	Kacang Tanah	-	43	43
5	Ubi Kayu	1.621	240	1.861
6	Ubi Jalar	15	45	60
7	Sayur	931	3.741	4.672
8	Buah-buahan	3.326	3.307	6.633
9	Minyak Goreng	-	902	902
10	Gula	-	1.164	1.164
11	Daging Sapi	29	11	40
12	Daging Ayam	595	440	1.035
13	Telur	24	2.225	2.249
14	Susu	-	1.050	1.050
15	Ikan	116	1.232	1.348
Jumlah		18.049	16.573	34.622

Sumber Data : Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

Ketersediaan Energi dan Protein Tahun 2020

No	Konsumsi	Kal/Kap/Hari	Gram/Kap/Hari
1	Kalori/Energi	2.663	-
2	Protein	-	69,66

Tabel 3.2
Capaian IKK Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 (Angka Tetap 2020)

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUS/PERSAMAAN	CAPAIAN KINERJA	KET
13	Ketahanan Pangan	50	Ketersediaan Pangan Utama	<p><u>Rata - rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun :</u></p> $\frac{12.522 \text{ Ton}}{81.243 \text{ Orang}} \times 1000$ <p>(Jumlah Penduduk 2021)</p>	154,13 Kg/Orang	



Angka Ketersediaan Pangan Utama berdasarkan Komoditas Pangan dan Ketersediaan Energi dan Protein Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah Jumlah beras Produksi ditambah Impor adalah 11.295 Ton + 1.277 Ton = 12.522 Ton dan Jumlah Penduduk sebanyak 81.243 Orang, maka sesuai Rumus Ketersediaan Pangan pada Tahun 2020 berdasarkan angka Tetap 2020 Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Malinau adalah 154,13 Kg/Orang/Tahun

Tabel 3.3
Perbandingan Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2021 dengan Tahun 2020

URUSAN	IKK	RUMUS	CAPAIAN KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2020	PERBANDINGAN (%)
1	2	3	4	5	6
Ketahanan Pangan	Ketersediaan Pangan Utama	$\frac{\text{Rata-rata Ketersediaan Pangan Utama}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 1000$ <p>12.522 Ton 81.243Orang (Jumlah Penduduk)</p>	154,13 Kg/Orang/ Thn	120,66 Kg/Orang/ Thn	78,82 %

Perbandingan Angka Ketersediaan Pangan Utama pada Tahun 2021 berdasarkan angka Tetap 2020 yaitu 154,13 Kg/Orang/Tahun dengan realisasi tahun sebelumnya (tahun 2020) sebesar 120,66 Kg/Orang/Tahun, dengan Perbandingan 78,84 % maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya naik sebesar 78,28 % terhadap capaian tahun lalu;

(2). Aplikasi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Kementerian Pertanian RI

Berikut adalah Pengukuran pencapaian kinerja menggunakan rumus penghitungan capaian kinerjadengan Sistem Aplikasi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesiadengan hasil penghitungan sebagai berikut :



Tabel 3.4
Hasil Pengukuran Aplikasi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
Berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Malinau Tahun 2021
(Angka Tetap 2020)

No	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor Riil	Skor PPH	Skor Maks	Skor Riil terhadap Skor Maks
1	Padi-padian	1.621	73,70	0,5	36,90	25.00	25.00	+
2	Umbi-umbian	213	9,68	0,5	4,80	2.50	2.50	+
3	Pangan Hewani	215	9,79	2,0	19,60	19.60	24.00	-
4	Minyak dan Lemak	276	12,55	0,5	6,30	5.00	5.00	+
5	Buah / Biji Berminyak	20	0,89	0,5	0,40	0.40	1.00	-
6	Kacang-kacangan	96	4,38	2,0	8,80	8.80	10.00	-
7	Gula	143	6,50	0,5	3,20	2.50	2.50	+
8	Sayuran dan Buah	78	3,53	5,0	17,70	17.70	30.00	-
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2,663	121,02		97,70	81.50	100	

Sumber Data : Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

Rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan & Gizi (WNPNG) x tahun 2012
 Angka Kecukupan Gizi tingkat ketersediaan
 Energi : 2.400 kkal/kap/hr
 Protein : 63 gr/kap/hr

KETERANGAN :

1. Ketersediaan Energi Kalori /Kalori/Tahun 2021 adalah 2.663 Kalori/Hari, artinya asupan energy yang berasal dari karbohidrat, protein dan lemak sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan yaitu 2.400 Kalori / Hari
2. Prosentase Kecukupan Ekonomi sebesar 121,02 %, artinya prosentase angka kecukupan energy ketersediaan diperoleh dari energy dibagi dengan standar 2.400 Kalori / Hari adalah sesuai dengan standar nasional
3. Terdapat nilai + atau kelebihan energi ketersediaan pada kelompok bahan Padi-padian dari skor Maksimal 25,00 yaitu tercapai 36,90 Kalori /Hari/Tahun dikarenakan meningkatnya produktivitas padi lokal untuk kebutuhan petani sendiri berupa beras konsumsi dan tidak di perjualbelikan (masyarakat umum perkotaan sebagian besar mengkonsumsi beras dari luar)
4. Skor PPH Ketersediaan 81,50 adalah masih dibawah SPM Nasional yaitu 83,2
5. Capaian Evaluasi Sasaran Riil tahun 2021 sebesar 97, 70 % dari Target Capaian 100% (Skor Maksimal / Nasional)



Tabel 3.5

Perbandingan Angka Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Tahun 2020 dengan Angka Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2019

Indikator Kerja Utama	Target PPH 2020	Realisasi PPH 2020	% Capaian 2020	Target PPH 2021	Realisasi PPH 2021	% Capaian 2021	Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya
PPH Ketersediaan							
Padi-padian	22,19	25.00	113 %	22,63	25,00	100%	100 %
Umbi-umbian	2,39	2.50	105 %	2,43	2,50	100%	100 %
Pangan Hewani	14,40	19.20	133 %	14,69	19,60	82%	102 %
Minyak dan Lemak	3,24	5.00	154 %	3,31	5,00	100%	100 %
Buah / Biji Berminyak	0,64	0.30	47 %	0,66	0,40	40%	133 %
Kacang-kacangan	10,50	8.40	80 %	10,71	8,80	88%	105 %
Gula	2,38	2.50	105 %	2,43	2,50	100%	100 %
Sayuran dan Buah	20,57	17.40	85 %	20,98	17,70	59%	102 %
JUMLAH	76,31	80,30	105 %	77,84	81,50	104,70 %	101 %

Sumber : Renstra dan Bidang Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

1. Skor PPH Ketersediaan Target 77,84 dengan Capaian Evaluasi sebesar 81,50 dengan kelebihan peningkatan 104,71 % dikarenakan terdapat bahan Padi-padian dari Target 22,63 yaitu tercapai maksimal 36,00 Kalori/Hari/Tahun (sesuai skor nasional) dikarenakan meningkatnya produktivitas padi lokal untuk kebutuhan petani sendiri berupa beras konsumsi dan tidak di perjualbelikan(masyarakat umum perkotaan sebagian besar mengkonsumsi beras dari luar)
2. Perbandingan Skor PPH dan NBM Ketersediaan Pangan Tahun 2021 dengan realisasi tahun sebelumnya (tahun 2020) sesuai dengan Laporan Triwulan IV tahun 2021 sebesar 81,50 Kalori dan realisasi tahun sebelumnya (tahun 2020) sebesar 80,30 Kalori, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaiannya sebesar 101,49 %

Pengukuran Tujuan Mewujudkan Ketahanan Pangan Mandiri melalui Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat dengan Indikator kinerja sasaran Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan . Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut :



Tabel 3.6
Evaluasi Pencapaian Sasaran Tahun 2021
Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Kalori	76,31	80,30	101 %	77,84	81,50	101,49 %

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Dinas Ketahanan Pangan telah berhasil merealisasikan sebagian besar sasaran di tahun 2021 bahkan banyak indikator kinerja melampaui target. Namun demikian ada beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum sesuai target yang diharapkan.

Maka secara umum Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun - tahun sebelumnya dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini
Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun Sebelumnya				Persentase Kenaikan /Pemurunan Realisasi Tahun 2021 Vs Tahun			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2		3	4	5		6	7	8	
Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Kalori	81,50	70,50	78,10	79,20	80,30	114 %	103 %	101 %	101,49 %

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan 2016 - 2021 dapat disajikan sebagai berikut :



Tabel 3.8
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Target Renstra Tahun				Persentase Kenaikan / Pemurunan Realisasi Tahun 2021 Vs Tahun			
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	2		3	4	5		6	7	8	
Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Kalori	81,50	71,91	73,35	74,82	80,30	109 %	107 %	105 %	104,71 %

TABEL 3.9
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN REALISASI CAPAIAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun ke-					
					2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	11	12	13	14	15	
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan									
	1. Padi-padian	25,00	24,58	-	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	2. Umbi-umbian	2,50	2,64	-	2,20	2,50	2,10	2,50	2,50	2,50
	3. Pangan Hewani	24,00	15,95	-	13,30	11,10	12,70	19,20	19,60	19,60
	4. Minyak dan Lemak	5,00	3,60	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	5. Buah / Biji Berminyak	1,00	0,72	-	0,60	0,60	0,50	0,30	0,40	0,40
	6. Kacang-kacangan	10,00	11,63	-	9,70	8,20	7,50	8,40	8,80	8,80
	7. Gula	2,50	2,64	-	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	8. Sayuran dan Buah	30,00	22,78	-	14,80	23,20	23,90	17,40	17,70	17,70
	9. Lain-lain	-		-	-	-	-	-	-	-
		100,00			73,10	78,10	79,20	80,30	81,50	



TABEL 3.9 (LANJUTAN)

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TARGET RENSTRA BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan								
	1. Padi-padian	25,00	24,58	-	20.91	21.33	21.75	22.19	22.63
	2. Umbi-umbian	2,50	2,64	-	2.24	2.29	2.33	2.38	2.43
	3. Pangan Hewani	24,00	15,95	-	13.57	13.84	14.11	14.40	14.68
	4. Minyak dan Lemak	5,00	3,60	-	3.06	3.12	3.18	3.25	3.31
	5. Buah / Biji Berminyak	1,00	0,72	-	0.61	0.62	0.64	0.65	0.66
	6. Kacang-kacangan	10,00	11,63	-	9.89	10.09	10.29	10.50	10.71
	7. Gula	2,50	2,64	-	2.24	2.29	2.33	2.38	2.43
	8. Sayuran dan Buah	30,00	22,78	-	19.38	19.77	20.16	20.57	20.98
	9. Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-
		100,00			71,91	73,35	74,82	76,31	77,84

TABEL 3.9 (LANJUTAN)

PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA DENGAN RASIO CAPAIAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator Lainnya	Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	16	17	18	19	20
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan								
	1. Padi-padian	25,00	24,58	-	122%	118%	117%	113 %	100 %
	2. Umbi-umbian	2,50	2,64	-	100%	110%	92%	105 %	100 %
	3. Pangan Hewani	24,00	15,95	-	100%	80%	92%	133 %	102 %
	4. Minyak dan Lemak	5,00	3,60	-	167%	161%	160%	154 %	100 %
	5. Buah / Biji Berminyak	1,00	0,72	-	100%	97%	81%	47 %	133 %
	6. Kacang-kacangan	10,00	11,63	-	100%	82%	74%	80 %	105 %
	7. Gula	2,50	2,64	-	114%	110%	109%	105 %	100 %
	8. Sayuran dan Buah	30,00	22,78	-	78%	118%	121%	85 %	102 %
	9. Lain-lain	-	-	-					
		100,00				114 %	103 %	101 %	101 %



C. REALISASI ANGGARAN

Setiap Program dan Kegiatan yang di susun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antar program, kegiatan dan capaian kinerja dan realisasi kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA		PROGRAM/KEGIATAN	REALISASI KEUANGAN	
		Kalori	%		Rp	%
Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	81,50	104,70	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rp. 4.794.450.812,00	94,11
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 706.948.013,00	
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 80.000.000,00	
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 50.000.000,00	
					Rp 5.611.914.325,00	



Target tahun 2021, pembiayaan rutin Dinas Ketahanan Pangan diperoleh dari :

1. Dana Pembangunan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan diperoleh dari dana rutin Pemerintah Daerah. Total dana rutin yang dianggarkan dalam DIKDA Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 5.794.248.794,- Rincian anggaran dana rutin dapat dilihat pada tabel :

Rincian Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021

Belanja Tidak Langsung			
1.	Belanja Pegawai	Rp.	4.760.834.234,00
2.	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	-
Belanja Langsung			
1.	Belanja Pegawai	Rp.	149.710.000,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.043.104.560,00
3.	Belanja Modal	Rp.	20.600.000,00
Jumlah Anggaran Rutin		Rp	5.974.248.794,00

Sumber : DIKDA TA 2021, Dinas Ketahanan Pangan

2. Dana Pembangunan untuk membiayai kegiatan pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 dapat dilihat pada Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau sebagai berikut :

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI	% Capaian	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.605.676.997,00	4.840.385.812,00	4.794.450.812,00	99,05%	45.935.000,00
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	4.355.816.997,00	4.669.731.252,00	4.669.731.252,00	100,00%	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	4.355.816.997,00	4.669.731.252,00	4.669.731.252,00	100,00%	-
<i>Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah</i>	30.110.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00	100,00%	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	30.110.000,00	26.250.000,00	26.250.000,00	100,00%	-



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
Administrasi Umum Perangkat Daerah	192.870.000,00	124.404.560,00	98.469.560,00	79,15%	25.935.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.770.000,00	48.755.600,00	37.355.600,00	76,62%	11.400.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.350.000,00	15.160.960,00	15.160.960,00	100,00%	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.750.000,00	60.488.000,00	45.953.000,00	75,97%	14.535.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	26.880.000,00	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.880.000,00	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	963.560.000,00	912.760.000,00	706.948.013,00	77,45%	205.811.987,00
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	363.560.000,00	372.760.000,00	175.716.211,00	47,14%	197.043.789,00
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	55.000.000,00	55.000.000,00	33.962.500,00	61,75%	21.037.500,00
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	147.760.000,00	147.760.000,00	-	0,00%	147.760.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	85.000.000,00	85.000.000,00	84.091.083,00	98,93%	908.917,00
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	75.800.000,00	85.000.000,00	57.662.628,00	67,84%	27.337.372,00
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	80.000.000,00	80.000.000,00	77.958.002,00	97,45%	2.041.998,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	49.114.002,00	98,23%	885.998,00
Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	30.000.000,00	30.000.000,00	28.844.000,00	96,15%	1.156.000,00
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	520.000.000,00	460.000.000,00	453.273.800,00	98,54%	6.726.200,00
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	70.000.000,00	70.000.000,00	66.113.800,00	94,45%	3.886.200,00
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	450.000.000,00	390.000.000,00	387.160.000,00	99,27%	2.840.000,00
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	80.000.000,00	80.000.000,00	61.827.500,00	77,28%	18.172.500,00
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	80.000.000,00	80.000.000,00	61.827.500,00	77,28%	18.172.500,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	80.000.000,00	80.000.000,00	61.827.500,00	77,28%	18.172.500,00



PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN	REALISASI	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	50.000.000,00	50.000.000,00	48.688.000,00	97,38%	1.312.000,00
<i>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>50.000.000,00</i>	<i>48.688.000,00</i>	97,38%	<i>1.312.000,00</i>
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	48.688.000,00	97,38%	1.312.000,00
	5.699.236.997,00	5.883.145.812,00	5.611.914.325,00	95,39%	271.231.487,00

Setelah diuraikan di atas, dari sasaran yang harus di capai pada tahun 2021 Dinas Ketahanan Pangan, maka 12 kegiatan telah tercapai dengan baik yaitu realisasi keuangan **94,11 % sebesar Rp. 5.611.914.325,00-** dengan bobot fisik 12 kegiatan **96,62 %**.

Rincian Realisasi Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021

Belanja Tidak Langsung			
1.	Belanja Pegawai	Rp.	4.669.731.252,00
2.	Belanja Bantuan Sosial	Rp.	-
Belanja Langsung			
1.	Belanja Pegawai	Rp.	126.370.000,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.	815.813.073,00
3.	Belanja Modal	Rp.	-
	Jumlah Anggaran Rutin	Rp	5.611.914.325,00

Sumber : SIMDA KEUANGAN TA 2021, Dinas Ketahanan Pangan



Tabel 3.12

Anggaran Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE - (Rp)				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belanja Langsung	999.880.000,00	734.500.460,00	580.272.687,00	438.111.471,94	1.213.414.560,00
Belanja Tidak Langsung	3.470.694.114,00	4.035470.152,00	4.438.503.763,00	4.495.184.274,70	4.355.816.997,00
A. Belanja Pegawai	10.630.000,00	57.320.000,00	66.290.000,00	56.510.000,00	149.710.000,00
B. Belanja Barang dan Jasa	855.700.000,00	677.180460,00	513.982.687,00	381.601.471,94	1.043.104.560,00
C. Belanja Modal	133.550.000,00		-	-	20.600.000,00
Program Adminidtrasi Perkantoran	226.140.000,00	244.500.560,00	239.272.687,00	129.683.523,21-	170.654.560,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	629.560.000,00	432.680.000,00	274.710.000,00	308.427.948,73-	1.213.414.560,00

Tabel Tabel 3.12 (Lanjutan)
Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

URAIAN	REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE - (Rp)				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Belanja Langsung	990.361.450,00	621.235.789,00	578.161.130,00	430.594.747,00	37.247.231,00
Belanja Tidak Langsung	3.383.699.800,00	4.015.286.707,00	4.346.341.544,00	4.355.816.997,00	3.557.094.665,00
A. Belanja Pegawai	10.630.000,00	52.160.000,00	66.290.000,00	50.210.000,00	-
B. Belanja Barang dan Jasa	846.181.450,00	569.075.789,00	511.871.130,00	380.384.747,00	37.247.231,00
C. Belanja Modal	133.550.000,00	-	-	-	-
Program Adminidtrasi Perkantoran	224.787.482,00	244.500.560,00	239.272.687,00	129.315.000,00	7.380.000,00
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	621.393.970,00	324.575.329,00	272.598.443,00	301.279.747,00	29.867.231,00



Tabel Tabel 3.12 (Lanjutan)
Ratio Realisasi dan Anggaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

URAIAN	RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Belanja Langsung	99,05	84,58	99,64	98,28	3,07
Belanja Tidak Langsung	97,49	99,50	97,92	96,90	81,66
A. Belanja Pegawai	100,00	91,00	100,00	88,85	-
B. Belanja Barang dan Jasa	98,89	84,04	99,59	99,68	3,57
C. Belanja Modal	100,00	-	-	-	-
Program Adminidtrasi Perkantoran	99,40	100,00	100,00	99,72	4,32
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	98,70	75,02	99,23	97,68	2,46

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi dan Misi Daerah serta dalam rangkamewujudkan good governance pada instansi pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memberikan gambarantingkat pencapaian kinerja atas akuntabilitas dilihat dari capaian kinerja organisasi maupun dilihat dari pemanfaatan sumberdaya termasuk didalamnyadalam pemanfaatan anggaran

Keberhasilan pembangunan Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Malinau sebagaimana dituangkan dalam dokumen ini, merupakan kerja keras seluruh aparatur Pemerintah Daerah di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau dan dukungan serta partisipasi masyarakat serta dan berbagai elemenkemasyarakatan, dunia usaha dan pendidikan yang telah memberikankan sumbangsuhnya untuk kemajuan Kabupaten Malinau.

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau Tahun 2021 telah mencapai 94,11 % (Sangat Tinggi) dibandingkan dengan target tahun 2019 pada akhir periode Renstra dengan capaian 98,28 % (Sangat Tinggi), maka capaian tahun 2021 tidak terlalu jauh dari capaian tahun 2020 dikarenakan terjadi perubahan anggaran atau pengurangan dengan adanya Pandemi Covid 19 sehingga pelaksanaan sasaran strategis Dinas Ketahanan pangan didukung 4 program dengan jumlah anggararan Rp. 5.883.145.812,00- realisasi anggaran dalam menunjang capaian sasaran satrategis sebesar Rp. 5.611.914.325,00- (94,11%), prosentasi realisasi keuangan masuk dalam katagori Sangat baik. Efisiensi capaian kinerja sasaran strategis atas penggunaan sumberdaya sebesar 8,30%, tetapi tingkat efesiensi ini belum mencerminkan efektifitas penggunaan sumber daya khususnya dalam penggunaan anggaran, perlu dilakukan analisa yang lebih mendalam atas persentase penyerapan anggaran dibandingkan dengan realisasi fisik per kegiatan.

Harapan kami untuk tahun-tahun mendatang LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau selain berfungsi untuk mengukur keberhasilan dan atau kegagalan dalam menjalankan misi dan sasaran strategis organisasi, juga dapat digunakan sebagai upaya memacu usaha peningkatan kinerja dan pelayanan publik, dan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki keputusan dan kebijakan dari pemerintah.

Demikian LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Malinau yang menggambarkan capaian kinerja sasaran srategis dan indikator kinerja utama dan pada tahun 2021 dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malinau.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,



H. Saparudin, S.Sos.,M.Si
NIP. 19640125 198601 1 003

DOKUMENTASI
KEGIATAN TAHUN 2021



Alat Tulis Kantor dan Cetak tahun 2021

Monitoring Stok Pangan di Pedagang Grosir dan Eceran sebagai Bahan Laporan Stok Pangan Tim Gugus Covid-19 Kabupaten Malinau



Monitoring Harga Pangan di Pedagang Grosir dan Eceran sebagai Bahan Laporan Stok Pangan Tim Gugus Covid-19 Kabupaten Malinau



Monitoring Stok Pangan di Pedagang Grosir dan Eceran sebagai Bahan Laporan Stok Pangan Tim Gugus Covid-19 Kabupaten Malinau

DOKUMENTASI
KEGIATAN TAHUN 2021



Monitoring Stok Pasokan dan Distribusi Pangan di Pedagang Grosir dan Eceran



Pemantauan dan Pendataan Harga dan Stok Pasokan dan Pangan di Pasar Induk



Uji Sampel Keamanan Pangan Tahun 2021



KWT Bunga Lestari
Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara 77554, Indonesia
3°34'54", 116°39'23", 59.3m, 139°
22 Okt 2021 14:47:42

Kegiatan KRPL Tahun Anggaran 2021



3°34'55.194"N 116°39'23.934"E
101.1
Altitude: 5.9m
Speed: 0.2km/h
desa seruyung kec. malinau utara
Index number: 180
Selasa, 04 Januari 2022 13:24



DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MALINAU

**JL. Pusat Pemerintahan Gedung C Lantai II Gabungan Dinas
Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara 77554**

©Copyright_SungramKETAPANG 2022